

Politik Satu Dimensi: Tinjauan Kebijakan Kawasan Eko-Wisata Hutan Oeluan di Kabupaten Timor Tengah Utara

One-Dimensional Politics: Policy Review of The Oeluan Forest Ecotourism Area In North Central Timor

Veronika Ina Assan Boro*, Innosensia E. I. N. Satu**, Frans Bapa Tokan***, Emanuel Kosat****

FISIP, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Email: *veronikainaassan@gmail.com, **innosensatu31@gmail.com,

fransfisipunwira@gmail.com, *kosatemanuel@gmail.com.

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 20 Februari 2023 Direvisi: 7 Mei 2023 Disetujui: 19 Mei 2023 doi: 10.22212/jp.v14i1.4122	<p><i>This study aims to review the pattern of resistance in the development policy of Oeluan Forest ecotourism. The protest is based on the community's respect for sacred springs. The theory cluster of 'One-Dimensional Politics' as an analytical knife examines political practices that mainstream the economic impact of tourism. This study uses a qualitative approach with the specification of a descriptive-explorative method. The results of the research show that efforts to reify the Oeluan Forest, a political strategy to approach the community in a neat and planned manner, have triggered deforestation and desacralization that are rife in East Nusa Tenggara. The urgency of indigenous peoples' business lies in proposing multidimensional politics in the policy corpus of the Oeluan Forest ecotourism area.</i></p> <p>Keywords: <i>One Dimensional Politics; Indigenous Peoples; Ecotourism; Resistance.</i></p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau corak resistensi dalam kebijakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan. Protes tersebut berlatar penghormatan masyarakat terhadap mata air yang disakralkan. Gugus teori 'Politik Satu Dimensi' sebagai pisau analisis mencermati praktik politik yang mengarusutamakan dampak ekonomi pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi metode deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan upaya reifikasi Hutan Oeluan ialah strategi politik untuk mendekati masyarakat secara apik dan terencana telah memicu deforestasi dan desakralisasi yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Urgensi usaha masyarakat adat terletak pada mengajukan politik multidimensional dalam korpus kebijakan kawasan ekowisata Hutan Oeluan.

Kata Kunci: Politik Satu Dimensi; Masyarakat Adat; Ekowisata; Resistensi.

Pendahuluan

Persoalan impresif dari kebijakan pengelolaan ekowisata Hutan Oeluan, Desa Bijeli, Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2021, mengkonstatir penunggang kekuasaan dalam alam pikiran masyarakat adat. Logika kebijakan mengadopsi cara berpikir instrumentalis tersusupkan pada kerja kebijakan. Negara di titik ini memimpin kompromi dan melemahkan aspirasi masyarakat adat yang datang dari komunitas yang memiliki perspektif “*environmental ethics*”. Padahal perintah konstitusi mengakui dan menghormati masyarakat adat dengan perangkat kearifan lokal milik masyarakat *per se*. Lingkungan termasuk pula kategori dari kearifan itu. Adanya hubungan timbal balik menerangkan relasi ekologis masyarakat adat dan lingkungan. Daya tahan lingkungan diekspresikan melalui perwalian komunitas adat. Keadaan lingkungan yang kemudian diinterupsi oleh industri pariwisata sering menyisahkan degradasi lingkungan.¹ Kritik paling radikal ialah bahwasanya strategi bermuatan politik untuk implementasi kebijakan wisata merupakan biang keladi tindakan hegemonik kekuasaan dan modus eksploitatif terhadap alam.

Politik dengan wajah berdimensi satu telah menjadi ideologi yang dibenamkan dalam peradaban modern. Dimensi yang lain seolah tercerabut sebagai alternatif di dalam pembangunan. Politik dimensi satu ini turut serta untuk melanggengkan industri pariwisata nasional hingga aras lokal, khususnya melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023, di bawah rezim Victor Bungtilu Laiskodat, Gubernur NTT. Pencarian akar permasalahan kebijakan kawasan ekowisata Oeluan terletak pada rangkaian resistensi dari masyarakat adat di Desa Bijeli sejak tanggal 28

¹ Anggalih Kamim, “Perwujudan Sistem Politik Intrakomunitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan,” *Jurnal Politika* Vol 8, No. 1 (Mei 2017): 21.

Mei 2021. Konfrontasi antara masyarakat adat dan pemerintah bersumber dari kebijakan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT.

Masyarakat adat Oeluan, dalam posisi eksistensialnya banyak menggantungkan hidupnya pada alam. Perilaku berbasis filosofi “Dawan” (sebutan untuk suku-suku di Timor) ini menerangkan perilaku bijaksana dari masyarakat adat merawat alam. Keterikatan secara ekologis dan emosional telah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Jika tiba pada suatu fase ada pengingkaran terhadap relasi ekologis tersebut, maka konsekuensi logisnya ialah akan timbul bencana. Berbagai bencana seperti kekeringan, kemiskinan struktural, kelaparan dan seterusnya diinsafi sebagai pratanda hutan secara konsisten mengalami degradasi dan pedesakralisasian. Permenungan masyarakat adat Oeluan, di Desa Bijeli, mempercayai bahwasanya hutan sebagai nenek moyang atau leluhur mereka. Kepercayaan yang telah berurat akar tersebut terkristalisasi sesuai diktum dawan “*atoin meto*” (orang Timor); Nasi’ (Pah) atau yang dapat diartikan bahwa hutan adalah leluhur kita (dalam kultur patriarkal). Oleh sebab itu, masyarakat selalu tidak segera ragu bertindak sebagai wali atau pengampu hutan apabila ada penyerobotan hutan mengatasnamakan pembangunan.

Masyarakat adat di desa Bijeli, memiliki kekayaan alam khas Hutan Oeluan. Dalam sejarah tutur lisan, Hutan Oeluan ditempati oleh Suku Fernandes dan Suku Radrigis. Kedua suku ini memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dan dilegitimasi dalam struktur kepemilikan tanah adat sebagai tua adat untuk menjalankan ritual-ritual. Relasi ekologis bermuatan sakral memercayai Hutan Oeluan itu sumber kehidupan karena sejak zaman dulu para leluhur mengultuskan sumber mata air di dalam hutan sebagai simbol kesakralan. Bahkan di situ ada wujud penunggu dalam

rupa binatang-binatang. Dari sumber mata air dihuni oleh binatang e.g. ular, belut, dan lain sebagainya yang muncul ke permukaan air saat dikunjungi oleh suku Fernandes dan Suku Radrigis. Binatang yang disimbolkan sebagai penjaga hutan itu tidak boleh diusik keberadaannya sebab binatang merupakan wujud nyata dari para leluhur. Mata air tersebut pun tidak boleh dipakai sembarang oleh manusia.

Pada perkembangan berikutnya, negara dengan rasionalitas pembangunan dengan cara terencana dan terstruktur mendekati elit lokal setempat untuk mempersuasion agenda pembangunan pariwisata dengan garansi *trickle down effect* guna akan meneteskan kesejahteraan dan kemakmuran. Elit lokal dapat dipengaruhi karena secara potensial memiliki kedekatan dengan kekuasaan pada saat kontestasi lokal.² Pemerintah tentu tahu strategi untuk mendekati diri pada elit lokal dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik dalam politik informal.³ Walhasil terjadilah pembangunan ekowisata termasuk menyerobot sumber mata air keramat yang sebelumnya mampu mengairi lebih dari 178 hektar sawah kini tinggal mengalir beberapa areal saja. Konsekuensi logisnya ialah lenyapnya modal sosial, kearifan lokal, dan nilai-nilai fundamental pertanian kultural.⁴

Apa yang disangka sebagai usaha mengelola bumi/tanah/lahan/hutan menjadi sumber keuntungan ternyata pada waktu yang sama ialah perampasan (pengerukan dan pengrusakan) atas ruang hidup (*lebenswelt*) masyarakat adat dan penggusuran penduduk. Negara menjustifikasi kealpaan dari rakyat

sebagai alasan untuk merampas hak milik (*eigendom*) masyarakat adat itu sendiri. Inilah logika ekonomi modern bak suatu mitos yang terus dianut oleh birokrasi nasional dan korporasi transnasional dalam menggalangan pembangunan pariwisata. Politik dimensi satu berbasis rasionalitas instrumentalisteknologis memicu pertikaian antar suku, yang dapat disulut oleh pemerintah untuk kemudian mempromosikan solusi ekonomi hasil kebijakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan. Utopi ekonomi mudah untuk disusupkan pada masyarakat rentan, kelompok subsisten dan perempuan⁵ sebagai kaum proletarnya proletariat.

Kata kunci untuk mengoreksi kebijakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan dan janji pertumbuhan ekonomi memerlukan otonomi sebagai prinsip utama masyarakat adat. Pertumbuhan ekonomi dalam tafsir tunggal pembangunan negara malah memperkuat disparitas dan sengketa struktural agraria diantara suku-suku penghuni Desa Bijeli. Politik dimensi satu sepihak menggusur dimensi lain untuk janji kemakmuran rakyat dalam ikatan materialisme praktis.⁶ Padahal sekian lama kita coba melupakan trauma dari watak kolonialisme, tapi kini rakyat kembali terperangkap dalam penjajahan oleh nalar kapitalisme negara, yang sudah oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai pendiktean dari neo-kolonialisme dan imperealisme. Pembangunan pariwisata yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT terkesan mengesampingkan perspektif etika lingkungan. Alih-alih mensejahterakan masyarakat, malah monopoli isi dari hutan Oeluan secara khusus melalui pembendungan mata air yang kemudian ramai diprotes

2 Ahmad Bilal, Sri Yunanto, "Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017," *Jurnal Politica* Vol 13, No. 2 (November 2022): 205.

3 Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 19.

4 Hariadi Kartodihardjo, "Defisit Modal Sosial dalam Food Estate," Kompas, 17 Februari 2023, 6.

5 Ruth Rahayu, "Praxis Gerakan Feminis di Indonesia: Dinamika Aksi Politik dan Produksi Pengetahuan," *Jurnal Perempuan* Vol 27, No. 2 (Agustus 2022): 107.

6 Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, *Diskursus Teori-Teori Kritis* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), 152.

masyarakat adat Desa Bijeli.

Pengertian rasionalitas pembangunan mengandung persembunyian ideologi kapitalistik, karenanya dianggap bermuatan satu dimensi saja, seyogianya bermakna ganda. Di satu pihak seolah sebagai kritikus atas kemiskinan masyarakat adat di Desa Bijeli, kawasan Hutan Oeluan karena gagal memaksimalkan potensi hutan, namun rasionalisasi tersebut juga di pihak lain merupakan apologi yang menjustifikasi proses-proses untuk melestarikan industri pariwisata dengan mengunggulkan kelas menengah dan pemodal. Perluasan penggunaan rasionalitas ini pun dirasakan oleh masyarakat adat, yang sebelumnya hanya dialami dalam corak masyarakat industri. Industrialisasi pun kini merasuk pada masyarakat adat yang dengan begitu saja menerima kebijakan pembangunan. Seolah-olah keadaan sedang baik-baik saja namun sebetulnya mengambil bentuk baru penindasan yang terencana dan terstruktur. Politik satu dimensi dilembagakan kepada masyarakat adat melalui para elit lokal dan tetua adat yang menyerahkan hutan Oeluan.

Oleh sebab itu persolan protes yang terjadi di Hutan Ekowisata Oeluan menjadi strategis dan akut untuk ditinjau sejauh mana politik satu dimensi ini digulirkan melalui lobi-lobi politik kekuasaan. Pertengkaran antara masyarakat adat dan pemerintah bersumber dari kebijakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT. Tim peneliti mengajukan suatu cara kritis membaca industri pariwisata (sekalipun berbasis konsep wisata green economy) dengan melihat rasionalitas kekuasaan di balik lahirnya suatu kebijakan publik untuk mengontrol cara masyarakat melihat realitas.⁷ Hutan Ekowisata Oeluan dipilih sebagai lokus penelitian sebab di tempat itu menjadi lokasi protes sosial

7 Wayne Parsons, *Public Policy* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

untuk mengekspresikan kelestarian hutan dari tindakan dominasi dan eksploitasi apapun itu bentuknya. Lebih lanjut hutan Oeluan menyimpan nuansa magis. Masyarakat adat memiliki mata air keramat di dalam Hutan Oeluan.

Pembangunan yang salah ini telah menyebabkan desakralisasi martabat masyarakat adat. Masyarakat adat telah kehilangan sarana simboliknya yaitu mata air sebagai media membangun hubungan yang baik dengan para leluhur. Tindakan eksploitasi isi hutan akhirnya mendisfungsikan hutan terhadap proses alami kehidupan. Padahal pembangunan bukan untuk menghancurkan atau mematikan. Model pembangunan yang disangka universal dan lasim diterapkan pada negara-negara berkembang, telah luput untuk mengkompromikan dan menghitung pengalaman masyarakat dan alam. Karena itu kita berada pada situasi anomie, yaitu sebagai suatu harga yang digaransikan terhadap nalar ekonomi. Pembangunan tidak selamanya dari atas (wali) dalam perencanaan, pengendalian, dan manajemen, namun haruslah disertai pembangunan dari bawah (akar rumput: masyarakat adat)⁸ yang menitikberatkan aspek emansipatoris, egaliterianisme dan etikabilitas. Naifnya pembangunan ekowisata Hutan Oeluan kuang berpihak pada masyarakat adat seutuhnya sebagai tujuan pembangunan yang utama. Proses penyejahteraan manusia itu berlangsung kurang manusiawi dan mengabaikan etika lingkungan dengan jebakan politik satu dimensi.

KerangkaTeori: Politik (Manusia) Satu Dimensi

Secara umum, konsep manusia satu dimensi menurut Filsuf Marxis mazhab Frankfurt, Herbert Marcuse (1898-1979) memperlihatkan pereduksian terhadap eksistensi manusia yang multidimensional.

8 Edward Aspinal dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale*, 76.

Melalui industrialisasi di dalam segala sendi kehidupan, dalam kenyataannya politik dan ekonomi memproduksi kebutuhan dan keinginan semu untuk mengerang masyarakat. Asal muasal pereduksian manusia satu dimensi mewarisi logika Cartesian dan Kantian. Dalam situasi patuh tersebut masyarakat dibungkam daya kreatifitasnya sehingga proses dehumanisasi terjadi karena persetujuan masyarakat secara tidak sadar. Kapitalisme dan industrialisasi diperluas tidak saja pada masyarakat modern tapi juga menjangkau semua lapisan masyarakat untuk menguatkan kebenarannya yang tunggal. Pada intinya melalui keuntungan dan pertukaran komoditi sebagai standar kebutuhan masyarakat.

Industrialisasi yang dipakai oleh kekuasaan menekan masyarakat begitu kuat hingga masyarakat melihat alam pun sebagai sesuatu obyek yang perlu didominasi. Para filsuf mazhab Frankfurt lainnya memiliki pergulatan pikiran yang sama dalam mendefinisikan realitas tersebut. Kondisi yang mana diucapkan oleh Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) yaitu dunia yang teradministrasi, atau menurut Max Horkheimer (1895-1973) dengan istilah organisasi irasional, dan menurut Jürgen Habermas (1929-sekarang) dunia yang terkolonialisasi⁹. Persis seperti menurut Marcuse sendiri dideskripsikan sebagai masyarakat satu dimensi. Realitas deskriptif di atas menunjukkan kalau masyarakat dibentuk oleh kekuasaan dengan rasionalitas yang mengandalkan kekuatan analitis-empiris dan bersifat instrumental.

Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan telah melumpuhkan semua kerifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Meredupnya entitas masyarakat sekaligus menguatkan penalaran pembangunan melalui reifikasi, hegemoni, tanpa tawaran yang memperlihatkan alternatif. Masyarakat

terkondisikan seturut perbedaan kelas-kelas, dialienasikan, dan pemalsuan kebutuhan masyarakat dari arogansi pembangunan. Masyarakat kini menjadi sangat deterministik dan kehilangan sikap kritis sebab dikendalikan oleh logika empiris yang batas-batasnya dikendalikan oleh kenyataan objektif. Oleh sebab itu melalui kesadaran psikoanalisis (dikembangkan para Freudian Libertarian seperti Marcuse) dan penegasian yang beriktir membuka selubung irasionalitas yang secara ideologis menutup kesadaran kritis masyarakat.

Marcuse mengklaim bahwasanya rezim demokrasi dalam masyarakat bersifat toleran-represif¹⁰ sebab dalam kenyataannya ialah ekspresi kekuasaan totaliter. Kompromi kekuasaan belum berlangsung orisinal dengan menskematisasi konsensus masyarakat untuk menerima begitu saja kehendak dari pembangunan.

"The totalitarian tendencies of the one-dimensional society render the traditional ways and means of protest ineffective—perhaps even dangerous because they preserve the illusion of popular sovereignty." (Herbert Marcuse, 1964)

Represi dalam sektor politik dijadikan alat kontrol dengan secara sistematis mereduksi manusia dalam sebuah dimensi rasionalitas teknologis atau manusia dimensi satu. Sistem teknologis dalam masyarakat telah terusun sedemikian rupa sehingga kendati terdapat gelombang protes justru dapat menstabilkan kehendak pembangunan. Perlawanan terhadap sistem tentu tidak akan dibiarkan, dan sistem teknologis yang telah terusun sedemikian rapi akan segera membereskannya. Menolak menyesuaikan diri dengan sistem teknologis akan menyebabkan titik dilematis berujung kekalahan telak.

Rasionalitas teknologis sudah menindas dimensi-dimensi kehidupan yang lain. Setelah sebelumnya manusia bebas untuk

⁹ Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, *Diskursus Teori-Teori Kritis*, 150-155.

¹⁰ Robert Wolf, Barrington Moore, Herbert Marcuse, *A Critique of Pure Tolerance* (Boston: Beacon Press, 1965), 82.

mengespresikan keberadaannya di dalam multi dimensi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjelma di dalam industri dengan memproduksi kesenangan masyarakat.¹¹ Sayangnya kebahagiaan itu tidak mungkin akan terealisasi sebab teknologi dan pengetahuan itu tidak melayani manusia namun justru mengendalikan manusia menjadi tidak otonom. Hukum rasionalitas teknologi termanifestasi di dalam otomatisasi, mekanisasi, standarisasi mengatur manusia. Rasionalitas teknologis memaksakan tuntutan politik dan ekonominya terhadap masyarakat. Kuasa teknologi memproduksi promosi-promosi pembangunan untuk dibenamkan pada wilayah batin dan psikis masyarakat.

Pada intinya rasionalitas teknologis ini menyerupai sistem. Dalam bidang ekonomi, prinsip determinisme ekonomi dianggap sebagai satu-satunya solusi kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan. Di bidang politik, inidkasi toleransi bekerja secara represif untuk memaklumkan suatu program/keputusan/kebijakan pembangunan. Marcuse memaklumkan politik satu dimensi itu pada para pembuat kebijakan dengan tipu daya dan arogansi kekuasaan mereka. Mengingat kekuasaan merupakan suatu entitas yang dominan menggunakan skala matematis¹² yang semata-mata berusaha melancarkan suatu tujuan dengan mengacu pada efisiensi. Rasionalitas formal atau rasio teknis didasarkan atas pertimbangan teknis yang bersifat kuantitatif dengan menekankan produktivitas dan efisiensi. Tidak heran rasionalitas seperti ini sangat ideologis untuk menguasai alam dan manusia serta bersifat metodelis.

Rasionalitas dan mitos secara dialektis sebagai dua unsur yang sama. Mitos melahirkan rasionalitas, namun rasionalitas yang membebaskan diri dari mitos pada

gilirannya menjadi mitos baru. Ada kebuntuan dari rasionalitas tradisional besutan Adorno-Horkheimer, maka Marcuse berperan penting menghidupkan ulang tradisi kritis dalam kecurigan pada rasionalitas teknologis. Sudah dikatakan kalau rasionalitas teknologis menekankan produktivitas, efisiensi, dan matematis yang melanggengkan resim pengetahuan dari masa ke masa. Pengkultusan terhadap teknologi dan ilmu mengambil bagian dari paham sanitisme dan positivisme yang menganggap universalitas kebenaran itu bermula dan berbasis fakta empiris yang sudah terverifikasi. Pola pikir ini meluas dan merasuki birokrasi dan perpolitikan. Karena itu rasionalitas teknologis tidak netral, sebab ia menyediakan diri bagi alat pelanggengan kekuasaan.

Sifat kritis dari rasionalitas teknologis sangat instrumental dan operasional.¹³ Instrumentalisasi memandang masyarakat hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu operasionalisasi menitikberatkan pada pengukuran pengetahuan dan kemanfaatan yang bisa diperoleh. Tentu saja cara pandang ini mengusur alterantif dimensi-dimensi lain termasuk di dalamnya kearifan budaya dan sosial sebagai modal masyarakat. Rasionalitas pun bergerak menurut kepentingan sendiri. Rasionalitas melepaskan diri dari manusia untuk memperbudak manusia pada segala ketergantungannya. Walhasil Marcuse mengonstatir bahwasanya rasionalitas teknologis sebagai rasionalitas politik yang melegitimasi kekuasaan.

Rasionalitas teknologis melahirkan suatu dunia baru yang berdimensi satu dalam aras pemikiran dan praksis. Dimensi satu dalam politik mempertahankan *status quo* dan menolak langgam oposisi dan negasi.¹⁴

11 Herbert Marcuse, *Der eindimensionale Mensch* (Berlin: Beacon Press, 1964), 25.

12 Herbert Marcuse, *Negations* (London: MayFlyBooks, 1968), 153.

13 Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man* (New York: Routledge, 1964), 147-160.

14 Herbert Marcuse, *Five Lectures: Psychoanalysis, Politics, and Utopia* (Berlin: Beacon Press, 1970), 69.

Sekalipun ada oposisi namun esensinya semata-mata melanggengkan sistem lama. Kondisi ini memperlihatkan penindasan di dalam keadaan yang disangka sedang normal dan baik-baik saja. Marcuse di kemudian memproklamirkan cara terbaik bisa keluar dari jebakan rasionalitas ini ialah melalui revolusi. Dengan cara mengganti logika penguasaan menjadi logika yang tidak lagi menindas. Logika itu baru bisa muncul melalui sikap negatif yang loyal pada masyarakat marginal, yaitu negasi pada ekonomi industrialis dan politik represi. Pemikiran negasi akan membuka selubung ideologis dengan menempuh revolusi sosial *The Great Refusal*,¹⁵ buah pikiran praksis dari Sang Nabi bagi Gerakan Kiri Baru ini

Metode Penelitian

Kajian ini memilih menggunakan paradigma post-positivistik dengan metode yang digunakan ialah kualitatif. Metode kualitatif sendiri mengacu pada defenisi yang lebih komprehensif untuk penelitian dalam memperoleh data deskriptif lewat kalimat langsung atau tidak langsung dari masyarakat dan perilaku yang bisa dilihat. Inilah cara mendekati dunia empiris secara realistis sistemik. Jadilah pendekatan kualitatif yang bertumpu pada spesifikasi deskriptif-eksploratif. Penelitian post-positivis merupakan satu di antara 2 paradigma penelitian ilmu sosial lainnya, yaitu paradigma penelitian kritis dan interpretatif.¹⁶ Dalam metodologi kualitatif, peneliti melihat pengaturan dan orang secara holistik; orang, pengaturan, atau kelompok tidak direduksi menjadi variabel, tetapi dipandang sebagai keseluruhan. Peneliti kualitatif mempelajari orang-orang dalam konteks masa lalunya dan kondisi seperti apa orang-orang memahami kepribadian masing-masing. Sebab saat kita mereduksi kata-kata

dan tindakan orang menjadi persamaan statistik, kita bisa melupakan sisi kemanusiaan dari kehidupan sosial. Peneliti kualitatif fleksibel dalam cara mereka melakukan studi.

Peneliti itu ialah seorang pengrajin. Ilmuwan sosial kualitatif didorong untuk menjadi dirinya sendiri. Ada pedoman yang harus diikuti, tapi tidak pernah memerintah. Metode melayani peneliti; peneliti tidak pernah menjadi budak prosedur dan teknik.¹⁷ Kajian ini bertujuan untuk meninjau politik represi yang menskematisasikan konsensus untuk kebijakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan. Politik berdimensi satu pemerintah yang berkuasa menyulut resistensi masyarakat adat, dan karenanya tinjauan ini menginsafi tindakan pemecahan masalah yang nantinya berdampak pada prinsip pembangunan yang egaliter, memanusiakan manusia dan melestarikan alam.

Penggunaan metode penelitian kualitatif pada dasarnya mengandung informasi tentang fenomena yang diteliti, informan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di kawasan ekowisata Hutan Oeluan dengan mendekati realitas secara komunikatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengatasi persoalan politik pembangunan, dalam konfrontasi masyarakat adat dan pemerintah dengan cara menggali dan memahaminya.¹⁸ Model penelitian yang dipakai yakni model deskripsi-eksploratif di atas. Hal ini berarti peneliti menyajikan narasi secara rinci, menemukan fakta-fakta baru yang lebih akurat dan membuang data yang lama, mengkategorikan dan mengklasifikasi jenis, menjelaskan langkah-langkah penelitian, mendokumentasikan proses dalam arti mekanisme sebab akibat, dan melaporkan latarbelakang.¹⁹

15 Douglas Kellner, *The New Left and The 1960s* (Canada: Routledge, 2005), 126.

16 Steven J. Tailor, cs, *Introduction to Qualitative Research Methods Fourth Edition* (New Jersey :John Wiley & Sons, Inc., 2016), 7-12.

17 Tailor, cs, *Introduction to Qualitative Research*, 7-12.

18 Creswell, Jhon, W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

19 Neuman, W, Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (New Jersey:

Dimensi spesifikasi deskriptif-eksploratif mencakup teori sekaligus praksis tindakan. Sebagaimana kehendak penelitian ini adalah untuk meninjau dengan pembacaan yang cermat langgam kebijakan publik hegemonik terhadap masyarakat adat. Karena pembangunan ekowisata Hutan Oeluan, masyarakat adat diasumsikan mengalami banyak momen represi politik yang totaliter tetapi pura-pura toleran. Obyek kajian studi ini ialah meninjau secara dialektis kompromi/konsensus antar komunitas adat dengan pemerintah setelah diawali dengan protes sosial dan kultural. Subyek kajian ditentukan melalui *purposive sampling*. Prioritas teknik pengumpulan data kajian bertumpu pada observasi partisipasi dan observasi non-struktur. Juga studi literasi tentang politik berdimensi satu dalam indsutri pariwisata.

Locus kajian dilakukan di ekowista Hutan Oeluan, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian dimulai sejak protes sosial masyarakat adat ketika pengresmian ekowisata Hutan Oeluan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengumpulan data diperoleh dari setiap *stakeholder* yang datanya berupa narasi. Penelitian terdahulu yang relevan dimanfaatkan sebagai sumber ilmiah yang digunakan sebagai gambaran dalam melakukan penelitian. Lalu kondensasi data ialah cara pembagian, pengutamaan, penyederhanaan, interpretasi, dan pentransformasian informasi yang telah diperoleh secara *de facto* berupa berkas dan data-data empirikal lainnya.

Di dalam metode kualitatif menggunakan perspektif Fenomenologi. Melalui itu teori fenomenologi menuntun peneliti untuk memperhatikan interaksi, pengenalan dan kesadaran diri dari manusia. Fenomenologi bergerak dari filosofi seperti dikonstatir oleh filosof Jerman Edmund Husserl (1859-1938)

(Pearson, 2014).

untuk melihat seperti apa infrastruktur dan esensi kehidupan pada satu fenomena untuk sekumpulan orang. Aliran fenomenologisme menekankan pentingnya memfokuskan asumsi dan arti untuk menginspirasi keyakinan manusia mengetahui bagaimana yang dipahami.

*"The phenomenologist shows man act, how man says and get, as a product of why man define their world. The task of the phenomenologist, and of qualitative methodologists like us, is to capture why man construct their realities. As we have emphasized, the phenomenologist tries to watch things from other man's points of view..."*²⁰

Oleh sebab itu dengan penafsiran menjadi penting untuk memahami pengalaman. Kita harus dapat memahami gejala dan dunia di sekitar kita karena sebetulnya takkan ada realitas yang terpisah bagi orang. Perspektif fenomenologis menekankan dua aspek penting. Pertama, memahami bagaimana pengalaman manusia dan seperti apa mereka menginterpretasi semesta. Kedua, model guna kita dapat memahami orang ialah serta merta terlibat dengan menekankan pengamatan komunikatif. Melalui pendasaran ini adapun Habermas kemudian mengembangkan teori murni untuk suatu praksis emansipatoris.

Struktur Penguasaan Ekowisata Hutan Oeluan

Kedaulatan atas hutan tanpa bayang-bayang kapitalisme industrialisasi masih jadi persoalan kendati negara mengakui entitas kesakralan yang dihidupi oleh masyarakat adat. Hegemoni pembangunan ditandai dengan penggunaan nalar modern yang dianggap lebih unggul dari nalar lain yang berlaku di masyarakat. Tantangan yang sama berloksi di Hutan Oeluan, Desa Bijeli, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang menyuplai sumber air bagi potensi pertanian, peternakan, dan konsumsi masyarakat di sana. Selain dari pada potensi alam, terdapat pula warisan budaya dan sejarah dari zaman tempo

20 Taylor, cs, *Introduction to Qualitative Research*, 7-12.

dulu yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu hal yang menjadi perhatian serius ialah terkait status penguasaan hutan Oeluan oleh kepentingan pariwisata. Kehidupan harian masyarakat dengan tradisi dan sosial meredup di tengah ide penguasaan hutan untuk produksi pariwisata dengan nilai tambahnya. Pembangunan ekowisata Hutan Oeluan telah memisahkan masyarakat adat dengan alam sebagai suatu elemen kehidupan yang holistik.

Tabel 1. Wilayah Terdampak Pembangunan

No	Wilayah	Desa
1	Timur Hutan Oeluan	Nifuboke dan Nibaaf
2	Barat Hutan Oeluan	Jalan Trans Timor
3	Utara Hutan Oeluan	Nifuboke dan sekitarnya
4	Selatan Hutan Oeluan	Popnam

Sumber, Monograf Desa Bijeli, 2023.

Nalar pasar, komoditas, produksi pariwisata sebagai arus utama rasionalitas negara mengusung wisata premium di setia daerah, di Indonesia. Nalar itu kini merasuk Pemerintah Provinsi NTT menjadikan Hutan Oeluan perlu disulap jadi ekowisata dengan nada tunggal rasionalitas pemerintah di anggap lebih paham dari masyarakat adat yang masih kolot dan kampungan. Akibat persilangan kepentingan lantas masyarakat adat kemudian dituduh tidak paham. Kontradiksi ini mengakibatkan desa-desa lain yang berada di sekitar hutan Oeluan ikut berhadapan dengan negara.

Karena itu, eksploitasi terhadap Hutan Oeluan menyebabkan beberapa desa sekaligus memperoleh dampak yang tidak menguntungkan. Masyarakat tidak bisa dengan mudah mengakses sumber daya hutan. Termasuk di dalamnya debit mata air yang berkurang di hutan kemudian

menjadikan sawah masyarakat di beberapa desa menjadi kering. Negara seolah memimpin dan memperluas ketegangan dengan masyarakat adat setempat sebab respon solidaritas masyarakat lokal itu tinggi bila ada ketimpangan dan ketidakadilan sosial.

Lebih dari itu, perlu mengingat bahwa kendati Hutan Oeluan berada di wilayah administratif desa Bijeli akan tetapi keseluruhan kawasan hutan juga meliputi desa-desa lainnya. Dengan memonopoli isi dari Hutan Oeluan secara khusus dapat memberi dampak pada desa-desa lainnya di Noemuti, TTU. Konflik antara masyarakat adat versus pemerintah menggambarkan secara mendasar adanya tantangan terbesar dari ketidakadilan sosial. Nalar produksi kini dilanjutkan pada masyarakat adat. Penantian dialog oleh masyarakat adat tidak terjadi. Proses pengresmian hutan ekowisata Oeluan dilakukan secara diam-diam. Titik keadilan dan keterbukaan semakin sulit dijangkau. Pandangan bahwa kemajuan mengafirmasi dalil pengambilan hutan dilaksanakan dengan yakin. Kenyataan ini meninggalkan ketidakadilan sebab bagaimana mungkin negara meneriakkan jargon sejahtera disaat yang sama masyarakat malah kehilangan ruang hidup dan budaya.

Riwayat hutan Oeluan dimulai tahun 1974 dengan adanya bibit kayu jati muncul di Timor. Maka Kepala suku (*Usif atau Vektor*) Gaspar Salem waktu itu melihat bibit kayu bisa jadi komoditi, atau disebut “kayu uang” (*Hau Loit*). Para warga pun mulai untuk menanam pohon jati di lokasi yang bernama Hutan Oeluan untuk melindungi air. Pada tahun 1976 dengan adanya planologi oleh Dinas Kehutanan, maka pemerintah memasukan area Oeluan sebagai hutan tanaman produksi. Saat itu jati yang ditanam umurnya baru tahun kedua sehingga masih berusia muda. Lahan hutan yang masih luas kemudian dimasukan sebagai peta hutan tanaman produksi dan

sejak saat itu beralih jadi tanah dan hutan milik negara. Padahal lokasi hutan itu milik orang perorangan dan tanah ulayat yang terdapat tempat ritus adat bagi Suku *Apaut*, *Radrigis*, dan *Fernandez*.

Di kemudian hari Suku *Apaut* ingin ambil hasil pohon mereka namun justru ditindak sebagai praktik *illegal logging*. *Yoseph Sala Apaut* dan keluarganya sering dipolisikan sebagai perambah hutan padahal tanah itu bagian dari kekuasaan suku mereka. Hutan Oeluan sesungguhnya adalah milik masyarakat Noemuti bukan milik kehutanan. Saat ini Pemerintah Provinsi NTT melalui Pemerintah Kabupaten TTU mengambil sebagian untuk wilayah ekowisata. Alhasil pembendungan sumber mata air hutan ke lokasi ekowisata mengakibatkan warga pemilik sawah terus mengalami kekeringan karena berkurangnya debit mata air. Prinsip ekowisata perlu berbasis pada masyarakat adat²¹ untuk pengembangan perdesaan. Aktivitas itu secara alamiah berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Ironi dari tanggung jawab moral negara memberikan dampak negatif. Di dalam areal hutan sebagian air digunakan lebih banyak ke arah wisata kolam renang dari pada irigasi ke sawah warga. Warga tiap tahun menunggu giliran penggunaan air karena sudah tidak cukup air yang mengalir ke sawah warga. Kebijakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan semakin membawa dampak kekeringan sawah. Mata air itu diperkirakan mampu mengairi lebih dari 178 hektar sawah. Akan tetapi saat ini cukup hanya mengalir beberapa hektar dan 57 hektar sawah lainnya telah beralih fungsi menjadi kebun. Desain pembangunan ini tentu saja merugikan hajat hidup masyarakat subsisten. Klaim pemberian kesejahteraan sebagai akibat langsung dari

pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak. Ruang hidup dan kehidupan mereka telah lenyap di rampas.

Masalah kekurangan air terjadi di areal persawahan masyarakat. Program ekowisata itu bisa berarti penghancuran ruang hidup, bahkan mereka berpotensi menjadi perantau karena lahan sawahnya mengalami kekeringan. Pemerintah mendukung program ekowisata hutan Oeluan dengan mendirikan bermacam-macam wahana. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 4 Januari 2022, menunjukkan bahwasanya kebijakan pembangunan dan pengembangan ekowisata Hutan Oeluan oleh pemerintah berbanding lurus dengan masalah deforestasi dan desakralisasi.

Semua wahana itu dikunjungi secara rata-rata oleh wisatawan dalam kurun tanggal 1 Januari 2022 mencapai 20-100 orang. Tetap saja ada kesenjangan atau jarak terhadap titik adil hutan maupun masyarakat adat. Pertama, lokasi pembangunan dinegasikan sebagai hutan yang tidak bertuan. Dalam kaca mata pembangunan, produk industri pariwisata tidak melihat kesenjangan tersebut. Kedua, pemerintah menempatkan diri sebagai pihak yang lebih tau dan mengatur hayat hidup orang banyak. Dampak sosial dari eksploitasi ini bisa dikaji dengan sejauh mana masyarakat setempat memperoleh dampak yang nyata dan positif namun nyatanya lebih banyak dampak negatif dan janji-janji.

Ekspansi kapitalisme di hutan Oeluan menempatkan posisi negara tidak lagi sebagai pelindung tapi malah penghukum. Relasi antagonis terjadi karena reifikasi komoditas untuk laku di pasar pariwisata. Nampak jelas upaya eksploitasi yang tidak menghiraukan kelangsungan ekosistem hutan. Rumah pohon yang dibangun dengan paku yang menembus batang pohon, penebangan dahan-dahan pohon yang dianggap tidak sesuai

21 Dhayita Tanaya, Iwan Rudiarto, "Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang," *Jurnal Teknik PWK* Vol 3, No 1 (November 2014): 79.

Tabel 2. Analisis Dampak Pembuatan Wahana Ekowisata Hutan Oeluan

No	Wahana/ spot ekowisata	Jumlah	Dampak
1.	Rumah Pohon	7 unit	Pemakuan pada pohon dan penebangan untuk menyesuaikan arsitektur rumah.
2.	Kolam pemandian	2 unit	Membendung air ke sawah masyarakat dan mencemari kesakralan mata air.
3.	Flying Fox	1 unit	Lokasi pembangunannya tidak sesuai.
4.	Aula serbaguna	2 unit	Pemakuan pada pohon.
5.	Lintasan sepeda	1 track	Menerabas hutan mengakibatkan ekosistem terganggu.

Sumber, Dinas Pariwisata Kabupaten TTU, 2021.

dengan aritektur perancangan pariwisata, penerabasan tetumbuhan untuk membuka jalan dan kolam pemandian buatan sekali lagi nampak jelas di depan mata sebagai prasyarat pertumbuhan. Padahal perlu dipahami bahwasanya logika “*development*” dan “*growth*,” itu menindas masyarakat sehingga paradigma “*degrowth*” sebagai penyeimbang untuk mempromosikan semangat solidaritas, kearifan, mitigasi bencana, keadilan sosial, hak asasi manusia berikut etika lingkungan.

Represi Pembangunan Politik Berdimensi Satu

Rasio teknologis dalam rupa kehendak negara, dalam jarak tertentu menjadi ancaman karena meniadakan otoritas lokal untuk menentukan garis hidup sendiri secara berdaulat. Politik satu dimensi ialah instrumen kekuasaan dengan peran secara ekonomi dan politis untuk meredam upaya kelas pinggir dalam membebaskan diri dari penghisapan korporasi dan kapitalisme. Negara menunggangi ruang psikologis masyarakat untuk secara sadar takluk pada nalar teknologis-instrumental, kendati mengorbankan masyarakat adat. Imajinasi agenda pembangunan pariwisata premium pada gilirannya memberikan konsensus palsu. Pada saat itu sesungguhnya pemerintah telah bekerja untuk melanggengkan posisinya dengan kontrol yang maksimal.

Pemerintah menggiring masyarakat dalam kerangka kebijakan pembangunan yang telah ditentukannya. Represi negara terindikasi dari dominasi keberkuasaannya dengan sekaligus menskenariokan konsensus di hadapan masyarakat adat.

Persoalan pembangunan Hutan Ekowisata Oeluan terjadi oleh karena pemerintah telah merampas kebahagiaan masyarakat, yang juga secara kodrati masyarakat berhak atas kebahagiaan. Pembangunan pariwisata yang berlokasi di alam pada kenyataannya tidak lagi menghargai dan merawat alam demi kelangsungan dan keberlanjutan ekosistem hidup.²² Relasi kuasa antara pemerintah dan pengusaha telah menghomogenisasi unsur-unsur biotik dan abiotik untuk melayani arogansi kapitalisme semata. Sumber mata air yang mengalir melalui hutan malah dibendung menuju kolam pemandian untuk kepentingan pembangunan yang kemudian dikonversikan guna memperoleh profit. Dengan begitu masyarakat adat pun kini harus mengeluarkan biaya untuk mengakses air yang sebelumnya dapat dengan mudah dinikmati oleh mereka. Fenomena berkurangnya volume mata air ialah sinyal bahwasannya ada kearifan-kearifan lokal dan hak dari alam yang telah dilanggar.

Ciri khas yang menonjol dari industri pariwisata ialah peran pengetahuan dan

²² Fauziah Hanum, dkk, “Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata di Desa Malatisuka,” JUMPA Vol 8, No 1 (Juli 2021): 25.

nalar teknologi. Segala sesuatu dipandang baik sejauh dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi, dan ditangani. Instrumentalisasi sebagai istilah kunci dari kontrol pemerintah merupakan suatu jalan mundur dari pembangunan. Sejatinnya pembangunan itu harus berjalan ke depan. Realitas pembangunan ekowisata Hutan Oeluan mengesampingkan nurani masyarakat karena mengabaikan hutan dan masyarakat. Mula-mula cara berpikir dan bertindak ini hanya dipraktekan dengan alam saja, tetapi kini diterapkan pada masyarakat (adat) di dalam seluruh lapisan sosial. Kecerdikan negara terletak pada kemampuan reifikasi ekowisata Hutan Oeluan sehingga masyarakat tersandra dalam keyakinan akan manfaat ekonomis dari pembangunan itu sendiri. Bukan saja mesin-mesin dan benda-benda dan alam yang diperalat, tetapi hal yang sama merasuk pula dalam wilayah politik, sosial dan kultural.

Masyarakat adat berubah menjadi takluk pada kehendak pembangunan karena dikondisikan secara ideologis. Pengkondisian ini membentuk sistem teknologis yang seluruhnya merangkum realitas alamiah dan sosial dalam cengkramanya. Sistem ini bersifat represif dalam berbagai arti. Sistem yang sebelumnya menonjol di masyarakat modern namun kini dirasakan pula oleh masyarakat tradisional (adat). Ekowisata Hutan Oeluan dengan menekankan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan kemakmuran, seolah-olah sistem industri pariwisata memberi kesan mau membebaskan manusia, tetapi pada kenyataannya hanya tertuju pada keterasingan dan perbudakan. Aparatus produksi dan melalui sistem teknologis mampu mempertahankan diri karena masyarakat memberi diri untuk loyal dan maklum.

Nalar ekomomi ini abai terhadap kedaruratan ekologis yang dikampanyekan

dunia internasional. Perjumpaan internasional telah berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil tertanggal 20-22 Juni 2012. Salah satu agenda utama Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Lingkungan dan Pembangunan (*United Nation Convergence on Environment and Development*) ialah membicarakan tentang pembangunan berwawasan ekologis. Pertemuan itu kemudian dikenal dengan Rio+20 yang menyoroti pengukuran kebijakan harus ramah lingkungan. Ide tentang *green economy* pun mendapat momentumnya karena perlunya memberikan perhatian pada kemakmuran ekonomi, keramahan pada lingkungan dan sekaligus berwawasan sosial. *Green economy* dapat dilihat sebagai anti-tesis terhadap konsep ekonomi konvensional yang secara naif hanya mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan malah menimbulkan disparitas sosial, kultural, dan ekologis.

Menakar konsistensi pemerintah Indonesia dengan masifikasi pembangunannya terhadap isu lingkungan seringkali menimbulkan situasi paradoksal. Padahal secara internasional, Indonesia telah mendorong *Reducing emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* ke forum PBB dimana sebagai negara berkembang Indonesia berpihak merawat hutan melalui konservasi dan pengelolaan lingkungan. Lebih lanjut dalam pertemuan forum G20, Presiden Indonesia, Joko Widodo dengan bangga mempresentasikan kemampuan Indonesia dalam merealisasikan cita-cita tersebut. Namun terlihat naif ketika dalam cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Media Twitter (3/11/2021) menjadi perbincangan publik. Beliau menandakan bahasanya pembangunan yang dimotori oleh pemerintah pada rezim Jokowi tidak boleh berhenti akibat emisi karbon dan isu deforestasi. Tak pelak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pun menindaklanjuti inkonsistensi

kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan berdampak kerusakan ekologis.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Provinsi NTT dan Kabupaten TTU) konsisten mendegradasi lingkungan hidup. Masyarakat adat pun harus bereaksi terhadap kesalahan kebijakan tersebut. Protes dari warga desa pada gilirannya timbul dalam wajah ganda untuk menggugat pemerintah. Di satu sisi atas nama pembelaan terhadap keberlanjutan lingkungan dari tindakan eksploitatif pemerintah dan pada sisi lainnya untuk menegakan wibawa komunitas adat. Skenario konsensus yang dipimpin pemerintah itu menjadi suatu jalan mundur dalam pembangunan. Sebab upaya reifikasi lokasi lahan desa telah menyandra masyarakat dengan ganti rugi material. Padahal harga ganti rugi material tidak sebanding dengan redupnya keramahtamahan masyarakat adat dan punahnya ekosistem lingkungan.

Mengembalikan Politik Multi-Dimensional

Masyarakat adatlah yang secara langsung turut serta menjaga, merawat dan melestarikan hutan untuk kelangsungan hidup mereka sebelum negara terlibat jauh untuk mengintervensi pengelolaan hutan.²³ Dengan demikian pemerintah telah merampas hak masyarakat ulayat untuk hidup dan mengelola hutan, apalagi eksistensi mereka sebagai masyarakat ulayat masih sangat kuat untuk hidup dengan ritual adat dalam lokasi hutan. Kalau negara memang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat seharusnya masyarakat dilibatkan dan diberikan rekognisi atas keberadaan mereka dalam memanfaatkan hutan secara bijaksana dengan dijamin kebijakan yang berpihak kepada hak masyarakat adat.

Pemerintah telah mendesakralisasi hutan.

Dalam hal ini sumber air pamali merupakan

²³ Tania Murray Li, *The Will to Improve* (Tangerang: Marjin Kiri, 2021), 37

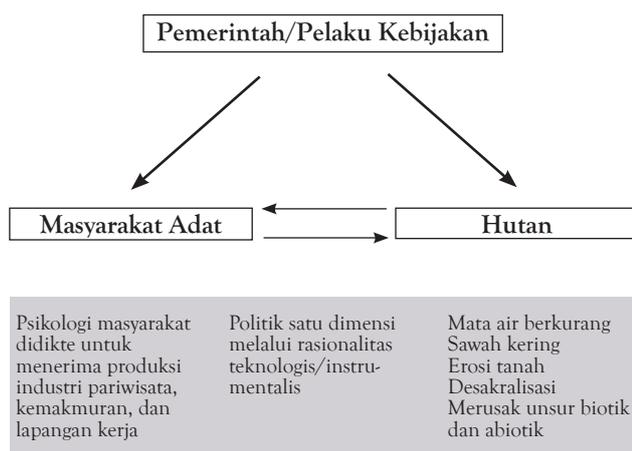
sesuatu yang keramat dan merupakan simbol harga diri dari para leluhur untuk dilestarikan generasi penerus menjadi terganggu. Dengan demikian nilai-nilai kesakralan dalam kearifan lokal untuk menjaga hutan sebagai ibu bumi pun terluka. Terlihat jelas dari menurunnya debit air dan terganggunya ketahanan pangan lokal masyarakat adat akibat kurangnya air untuk mengalir ke kebun dan persawahan. Mata air telah dialih-fungsikan untuk kolam renang dan kolam ikan dalam Hutan Oeluan demi kepentingan pendapatan daerah.

Pembangunan ekowisata Hutan Oeluan tentu sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata premium sebagai lokomotif pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam implementasi dari kebijakan tersebut perlu untuk dikelola secara arif dan bijaksana. Khusus hutan diperlukan banyak pertimbangan matang dan serius karena disitu pemerintah akan berkonfrontasi dengan masyarakat adat sekaligus terhadap kelangsungan ekosistem hutan. Mengabaikan protes masyarakat adat adalah pintu masuk bagi tindakan eksploitatif, dominatif dan hegemonisme. Begitu pula tindakan menerabas hutan adalah bentuk ketidakhormatan pada komunitas adat yang adalah simbolisasi martabat suatu desa. Dalam kasus inilah perlu ada dialog deliberatif dimana terjadi kesalingpengertian dan kerja sama antara masyarakat adat sebagai pengampu hutan dan pemerintah sendiri. Alhasil pelibatan masyarakat adat dan penghargaan terhadap hutan oleh pemerintah telah menjamin keberlanjutan alam yang partisipatoris demi menjamin kegaliterian seluruh elemen.

Konfrontasi antara masyarakat adat dan pemerintah bersumber dari kebijakan pembangunan pariwisata premium yang dipimpin oleh pemerintah. Dengan perspektif multidimensi politik sebagai tema utama penyadaran yang memposisikan alam dan

manusia partisipatoris, integral, holistik, dan egaliter. Karena itu manusia dan alam sebagai suatu kesatuan. Maka tidak dibenarkan pemboran sumur di dalam ekowisata Hutan Oeluan. Kenyataan tindakan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi NTT yang membuat sumber mata air baru telah melukai hati masyarakat adat. Karena masyarakat adat selaku pengampu dari hutan turut tersakiti dan karena itu mengucapakan hak hutan tersebut melalui resistensi terhadap pembangunan ekowisata Hutan Oleuan. Dampak buruk dari kebijakan yang menggunakan pendekatan politik satu dimensi itu dapat ditampilkan dengan bagan berikut ini:

Bagan 1. Siklus Kerja Politik Satu Dimensi dalam Kebijakan



Dari bagan di atas, dapat dijelaskan Kebijakan pemerintah yang bersifat rasionalitas instrumental, satu dimensi, dan tidak berwawasan kultural-ekologis terjadi pada pembangunan ekowisata Hutan Oeluan. Kenyataannya telah menimbulkan desakralisasi dan degradasi hutan. Pencemaran hutan dan pelemahan lembaga adat memposisikan masyarakat adat ter subordinasi. Pengambilan lahan hutan memarjinalisasi kehidupan ekologis. Tema penyadaran dan pembebasan dari kebijakan pembangunan yang hegemonik ialah melalui pemulihan terhadap kesadaran masyarakat yang terbelenggu mulai dari

kelompok-kelompok kecil mewujudkan kesadaran kritis. Kesadaran kritis menjadi promotor membongkar selubung ideologis yang menindas masyarakat. Kesadaran kritis untuk mengembalikan politik multidimensi membentuk kalangan masyarakat adat untuk berbalik dengan mengedarkan budaya etika lingkungan. Kebijakan berperspektif multidimensional sebagai alternatif radikal untuk membimbing cara pandang manusia dalam relasinya dengan alam dan manusia.

Kesimpulan

Isu lingkungan saat ini menjadi fokus perhatian internasional terutama melalui Rio+20. Dalam forum tersebut menginspirasi ide tentang *green economy* dengan memberikan perhatian pada kemakmuran ekonomi, keramahan pada lingkungan, dan sekaligus berwawasan sosial. Konsep ini mendorong terwujudnya kesejahteraan ekonomi yang mengakomodir isu sosial, kultural, dan ekologis. Adapun segala kerusakan alam, bencana, degradasi hutan, pemanasan global, cuaca ekstrim dan wabah penyakit terjadi akibat absennya perhatian umat manusia pada alam semesta. Keberlangsungan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan seakan-akan terancam punah. Manusia, tumbuhan dan hewan banyak mati. Penyebab dari itu semua ialah politik satu dimensi pemerintah, kemudian melegitimasi perilaku hegemonik terhadap eksploitasi hutan. Pelbagai problematika yang berkelindan dalam diskursus pembangunan ekowisata Hutan Oeluan mempresentasikan bahwa politik satu dimensi milik para pengambil kebijakan sebagai konsekuensi logis pengingkaran pada wacana konservasi lingkungan hidup dan penghargaan pada masyarakat adat.

Logika developmentalisme menyebabkan hutan Oeluan dioperasikan dalam satu dimensi pembangunan. Oleh sebab itu

langkah performatif dan prioritas ialah menyetujui lokalitas masyarakat adat terhadap kelangsungan ekosistem hutan. Mengabaikan protes masyarakat adat adalah pintu masuk bagi tindakan eksplotatif, dominatif dan hegemonisme. Dengan demikian korpus kebijakan perlu menerapkan politik multi-dimensi dalam dialog deliberatif dimana terjadi kesalingpengertian dan kerja sama antara masyarakat adat sebagai pengampu hutan dan pemerintah sendiri. Alhasil pelibatan masyarakat adat dan penghargaan terhadap hutan oleh pemerintah telah menjamin keberlanjutan alam yang partisipatoris demi menjamin keegaliterian seluruh elemen.

Komunitas adat dan hutan itu satu rantai dalam ekosistem kehidupan di bumi. Relasi ekologis di antara dua entitas ini merupakan suatu keniscayaan. Masyarakat sadar akan eksistensinya yang senantiasa menggantungkan hidupnya pada hutan. Lebih lanjut masyarakat meyakini hutan pun menginginkan perlakuan bijaksana dari manusia. Jika sampai pada suatu fase yang dengan mengatasnamakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan, pemerintah lalu mengingkari relasi ekologis itu maka pastilah akan timbul bencana. Tindakan menggerogoti kelangsungan simbiosis kehidupan yang telah terjalin secara alamiah memungkinkan bencana menjadi konsekuensi logisnya. Karenanya, urgensi usaha masyarakat adat kini sebetulnya terletak pada mengajukan politik multidimensional untuk mencegah kerusakan yang lebih parah muncul dan menyengsarakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinal, Edward dan Berenschot, Ward. *Democracy for Sale*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Bilal, Ahma dan Yunanto, Sri. "Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017," *Jurnal Politica* Vol 13, No. 2 (November 2022).
- Creswell, Jhon, W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dunn, Willian N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Hanum, Fauziah, dkk. "Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata di Desa Malatisuka," *JUMPA* Vol 8 No 1 (Juli 2021).
- Kamim, Anggalih. "Perwujudan Sistem Politik Intrakomunitas dan Sinergi Pengelolaan Lingkungan," *Jurnal Politica* Vol 8, No. 1 (Mei 2017).
- Kartodihardjo, Hariadi. "Defisit Modal Sosial dalam Food Estate," *Kompas*, 17 Februari 2023.
- Kellner, Douglas. *The New Left and The 1960s*. Canada: Routledge, 2005.
- Lawrence, Neuman, W. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New Jersey: Pearson, 2014.
- Marcuse, Herbert. *Der eindimensionale Mensch*. Berlin: Beacon Press, 1964.
- Marcuse, Herbert. *Five Lectures: Psychoanalysis, Politics, and Utopia*. Berlin: Beacon Press, 1970.
- Marcuse, Herbert. *Negations*. London: MayFlyBooks, 1968.
- Marcuse, Herbert. *One-Dimensional Man*. New York: Routledge, 1964.
- Murray Li, Tania. *The Will to Improve*. Tangerang: Marjin Kiri, 2021.

- Parsons, Wayne. *Public Policy*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Poespowardojo, Soerjanto dan Seran, Alexander. *Diskursus Teori-Teori Kritis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.
- Rahayu, Ruth. "Praxis Gerakan Feminis di Indonesia: Dinamika Aksi Politik dan Produksi Pengetahuan," *Jurnal Perempuan* Vol 27, No. 2 (Agustus 2022).
- Taylor, Steven J, cs. *Introduction to Qualitative Research Methods Fourth Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016.
- Tanaya, Dhayita dan Rudiarto Iwan. "Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang," *Jurnal Teknik PWK* Vol 3, No 1 (November 2014).
- Wolf, Robert, Moore, Barrington, and Marcuse, Herbert. *A Critique of Pure Tolerance*. Boston: Beacon Press, 1965.